

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	15
1. Spesifikasi Penelitian	15
2. Metode Pendekatan	15
3. Tahap Penelitian	16
4. Teknik Pengumpul Data	16
5. Alat Pengumpul Data	17
6. Analisis Data	17
7. Lokasi Penelitian	17
8. Jadwal Penelitian	18
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI OTONOMI DAERAH DAN PEMEKARAN WILAYAH SERTA IMPLIKASINYA	
A. Pemerintahan Pusat Dan Pemerintahan daerah	19
1. Pengertian Otonomi Daerah dan Pemerintahan Pusat	19
2. Unsur Otonomi Daerah.....	20
3. Asas Pemerintahan Daerah	26
4. Pengertian Pemerintahan Daerah Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang RI No 32 Tahun 2004	27
B. Otonomi Daerah.....	28
C. Pemekaran Daerah	34

D. Faktor Yang Mempengaruhi Pemekaran Daerah.....	41
E. Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).....	45

BAB III MEKANISME PEMEKARAN WILAYAH DI INDONESIA

A. Sejarah Terbentuknya Kabupaten Pangandaran	53
1. Lambang Daerah Kabupaten Pangandaran	56
2. Potensi Besar Yang Dimiliki Kabupaten Dan Desa Pangandaran	59
B. Pemekaran Wilayah Pangandaran.....	61

BAB IV IMPLIKASI DESA PANGANDARA SEBAGAI DESA WISATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN PANGANDARAN DI PROVINSI JAWA BARAT

A. Mekanisme Perubahan setatus kabupaten Sebagai Desa wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Perinsip Good Governance.....	69
B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Perubahan Setatus Desa Pangandaran Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan perinsip Good Governance	76
C. Jalan Keluar Yang Diambil Dalam Menyelesaikan Kendala Yang Dihadapi Dalam Perubahan Setatus Desa Pangandaran Sebagai Desa Wisata Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Perovinsi Jawa Barat Dikaitkan Dengan Perinsip Good Governance	83

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	91
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA	96
-----------------------------	----